
Legitimasi Praktis dalam Lingkup Sosial Politik: Sebuah Analisis Bibliometrik

Danang Bertrand Camico

Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Dompu (IKPMD) Malang
(Alamat Jl. Bendungan Sutami sigura-gura, Malang, Indonesia)

*Corresponding author: danangbertrandcamico@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan kajian topic tentang legitimasi praktis di berbagai negara di dunia dalam periode tahun 2019-2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan definisi dan fenomena legitimasi dalam perspektif ilmu politik, dan menemukan adanya analisis perbandingan atau komparatif tentang definisi legitimasi serta indikatornya, sehingga dapat memunculkan research gap dan question problem tentang legitimasi praktis yang berperan bagi riset yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah systematic literature review yang menggunakan 310 artikel ilmiah bersumber dari database scopus. Review artikel menggunakan aplikasi Vosviewer. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa topic kajian tentang legitimasi praktis dalam periode tahun 2019-2023 dapat dibagi menjadi empat kluster yaitu; kluster 1 didominasi oleh topic perception, kluster 2 didominasi topic democracy, Kluster 3 didominasi oleh kajian topic tentang framework, dan kluster 4 secara dominan membahas konsep legitimasi praktis yang berkaitan dengan politic dan decision making. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan Konsep/tema dominan yang sering dibahas oleh peneliti sebelumnya antara lain demokrasi, decision making, debate, argument, view, effect, support, experience, trust, perception, community, gap, survey, attitude, police, power, practice, accountability, framework, interest, dan legitimation. belum banyak artikel yang membahas tentang relasi ilmu politik dengan legitimasi, terutama legitimasi praktis, penyebab, serta dampak buruknya. Sehingga, Hasil penelitian dapat ini berkontribusi pada pengembangan roadmap penelitian tentang Kontradiksi Legitimasi Praktis Dalam Tinjauan Ilmu Politik. Keterbatasan penelitian ini adalah artikel yang digunakan hanya bersumber dari database scopus sehingga temuan penelitian tidak dapat menggambarkan secara komprehensif tentang isu legitimasi. Penelitian berikutnya perlu menggunakan artikel ilmiah yang bersumber dari database internasional bereputasi lainnya, seperti Web of Science dan Dimensions Scholars.

Kata Kunci: Demokrasi, legitimasi, masyarakat, politik, pemerintahan, sipil

Pendahuluan

Legitimasi merupakan unsur penting dalam kerangka mobilitas kekuasaan atau pemerintahan. Pasalnya, legitimasi adalah sebuah relasi atau hubungan politis antara yang memerintah dengan yang diperintah dan/atau yang memimpin dengan yang dipimpin (König & Wenzelburger, 2021). Legitimasi adalah bentuk pengakuan oleh masyarakat atas kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan mandat dan tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah negara. Berlakunya kebijakan publik dan penggiringan tindakan masyarakat yang sesuai dengan kehendak pimpinan berdasarkan hukum dan kebijakan sangat bergantung kepada seberapa besar legitimasi yang terbangun. Sinyal positif tentunya adalah hal yang wajib diberikan oleh pemerintah agar asumsi positif dan kepercayaan publik terhadap kekuasaan dapat

terbentuk menjadi legitimasi (Poelzer, 2019). legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat, di mana diperlukan sebuah tujuan organisasi tersebut seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. legitimasi diperoleh organisasi ketika dalam kondisi atau status ketika sistem nilai sebuah entitas kongruen dengan sistem nilai sosial yang lebih besar di mana entitas merupakan salah satu bagian darinya. Ketika terjadi sebuah disparitas (ketidaksesuaian) antara kedua sistem tersebut maka terjadi sebuah ancaman pada legitimasi masyarakat (Christenson & Glick, 2019).

Penelitian terdahulu difokuskan pada konsep legitimasi secara umum, yang Secara garis besar menjelaskan bagaimana legitimasi mengalami dinamika tergantung dari perlakuan kedua belah pihak sebagai entitas yaitu organisasi dengan masyarakat di lingkungannya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga banyak membahas tentang faktor dan indikator terbangunya legitimasi yang terinterdependensi terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku. Seperti yang dikemukakan oleh Konecny bahwa *In practice, in law it is the legitimacy of the legislative act, in political science it is the legitimacy of power, etc. Even the term interest, or public interest, is interpreted differently in various sciences* (in law, economics, political science, etc.) yang berarti bahwa Dalam prakteknya, dalam hukum yang dimaksud dengan legitimasi adalah tindakan legislatif, sedangkan dalam ilmu politik adalah legitimasi kekuasaan, dan sebagainya. Bahkan istilah kepentingan atau kepentingan umum dimaknai berbeda dalam berbagai ilmu (hukum, ekonomi, ilmu politik (Konecny, 2020).

Hasil penelitian oleh Aronson dkk. Mengemukakan tentang strategi membentuk legitimasi. Aronson menyatakan *A personalized public administration emphasizes individual decisionmakers and seeks legitimacy through familiarity with the character, identity, and virtues of individual agents, whereas a non-personalized public administration projects an ethos of technocratic decisionmaking, seeking legitimacy through institutional objectivity and impartiality.* temuan Aronson ini memiliki deduksi berupa keterpaparan terhadap informasi pribadi tentang Jaksa Agung menurunkan persepsi objektivitas kantornya, dibandingkan dengan tidak adanya keterpaparan terhadap informasi pribadi, apa pun jenis informasinya, arti-penting keputusannya, dan kecenderungan politik responden (Aronson et al., 2023). Selain itu, penelitian oleh Marti' menunjukan fenomena bahwa terkadang pemerintah harus mengambil resiko kehilangan legitimasi apabila keputusannya tepat bagi suatu masalah pada saat tertentu namun bersebrangan dengan sistem nilai yang dianut. Hal ini ia utarakan dengan pernyataan *"We need to maximize the quality of decisions and ensure that we find practical and effective solutions for our problems. The stakes are simply too high. The risk, however, is to give up democratic legitimacy for, in the best case, some form of output legitimacy or technocracy"* (Martí, 2022).

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak yang menjelaskan tentang legitimasi, konsep umum legitimasi, dan pola hubungan politis dan sosiologis serta budaya dalam legitimasi, namun penelitian terdahulu belum banyak yang menggunakan pendekatan

systematic literature review dengan artikel yang bersumber dari database scopus serta belum banyak yang menggunakan metode review artikel dengan aplikasi Vosviewer. Karena itu, penelitian ini fokus pada review paper dengan pendekatan SLR yang menggunakan 310 artikel ilmiah yang bersumber dari database scopus. Metode SLR merupakan metode ilmiah yang mempunyai kekuatan dan kelebihan dalam memahami isu-isu riset berdasarkan penelitian terdahulu.

Fokus kajian penelitian ini mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana Perkembangan kajian topic tentang legitimasi praktis dan bagaimana seharusnya legitimasi dibentuk idealnya berdasarkan pemahaman tentang ilmu politik, sehingga dapat menjadi question problem demi kebaharuan riset tentang legitimasi praktis”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analisis konten dengan pendekatan SLR dan analisis artikel menggunakan Vosviewer. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu khususnya ilmu politik dan pemerintahan yang terkait dengan legitimasi, demokrasi, dan fenomena dalam ruang lingkup sosial humaniora. Selain itu, manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pembentukan kebijakan publik yang bersifat *procedure due process of law*.

Kajian Pustaka

Legitimasi

Legitimasi dalam kajian ilmu politik Secara prosedural formal, pemerintah memiliki legitimasi yang sah melalui pemilu. Legitimasi prosedural menjadi karakter gagasan demokrasi prosedural yang berasumsi bahwa pemerintah (*the governor*) memperoleh kekuasaan jika yang diperintah (*the governed*) memberikan persetujuan mereka kepada penguasa (Plettenburg et al., 2021). Dalam konteks demokrasi prosedural, legitimasi untuk memerintah di peroleh melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Asumsinya, banyaknya pemilih menandai luasnya persetujuan terhadap penggunaan kekuasaan pemerintahan yang dikendalikannya. Namun asumsi prosedural tampak berlebihan karena tidak selamanya ada pengaruh signifikan antara legitimasi dalam pemilu dengan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Tidak jarang, dukungan yang diperoleh dalam proses kebijakan tidak mencerminkan legitimasi dalam pemilu. Secara teoritis, sesungguhnya, pemilu lebih berperan memberikan kewenangan formal kepada pemerintah. Pemilu hanya melegitimasi kedudukan pemerintah sebagai penentu kebijakan, bukan substansi kebijakan yang hendak diberlakukan pemerintah. Yang diberikan melalui vote adalah kewenangan formal, dan hal itu bukanlah satu-satunya faktor yang mengendalikan keputusan dan tindakan politik.

Dengan demikian, terbentuknya legitimasi praktis erat kaitannya dengan unsur-unsur yang mempengaruhi masyarakat secara psikologis, seperti sosok figure dan post truth yang mudah menyebar dan diasumsikan sebagai kebenaran oleh masyarakat sehingga yang sebelumnya bersifat subjektif menjadi objektif. Dalam kajian ilmu politik, kekuasaan yang dilegitimasi hendaknya didistribusikan untuk mencapai tujuan bersama seperti dalam teori dan konsep tentang negara. Hal tersebut merupakan pandangan politik dari sisi ilmu yang tidak hanya mengedepankan eksistensi, tetapi juga mengedepankan esensi dan fungsi dari kekuasaan. Oleh karena itu, seorang politisi atau negarawan juga harus dituntut memiliki kemampuan merumuskan dan menetapkan

keputusan atau kebijakan dalam memandang kekuasaannya (Godinho et al., 2021). Karena itu, hendaknya suatu legitimasi terhadap kewenangan dan kekuasaan sebaiknya tidak hanya terbangun berdasarkan asumsi subjektif, prosedural, dan pragmatis, tetapi juga ideal dan substantif.

Hasil penelitian oleh Plettenburg dkk. Menunjukkan fakta bahwa untuk membangun legitimasi masyarakat diperlukan tindakan yang teknokratis terhadap permasalahan yang dialami. Dalam konsep kajian ini, pemerintah Belanda dihadapkan dengan permasalahan berupa implementasi perjanjian kinerja dengan sasaran peningkatan legitimasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan perumahan sosial lokal lebih sulit dilakukan di kota-kota dengan wilayah perkotaan yang padat. Faktornya adalah permasalahan dalam rezim dan konteks tata kelola yang lebih luas, serta permasalahan dalam struktur antar-organisasi dan interaksi pemangku kepentingan terkait kerja sama tripartit antara para aktor utama (Plettenburg et al., 2021). Ini cukup menjadi pembuktian bahwa legitimasi praktis kerap kali dilakukan tetapi jarang disadari oleh politisi. Rata-rata upaya memperoleh legitimasi hanya di sasarkan untuk didapatkan pada saat kontestasi pemilihan umum saja, tanpa memperhitungkan bahwa jabatan, kekuasaan, dan wewenang fungsional dalam politik dan pemerintahan yang terlegitimasi adalah alat untuk mengimplementasikan kepentingan sosial.

Berbicara mengenai legitimasi praktis, erat kaitannya dengan unsur sosiologis dan sifat karakteristik nilai konsensus yang menyertainya. Zapp mengungkapkan bahwa Sikap masyarakat terhadap sains telah menurun pada periode terakhir seiring dengan munculnya wacana populis anti-ilmiah di seluruh dunia. Dengan mengendalikan sejumlah faktor sikap dan demografi, penelitiannya ini menguji apakah wacana populis dan perolehan suara serta pemerintahan rezim berdampak pada legitimasi publik terhadap ilmu pengetahuan pada periode 2005-2020. Temuan lintas negara menunjukkan bahwa populisme merupakan prediktor yang konsisten terhadap menurunnya dukungan terhadap ilmu pengetahuan di semua model, apa pun sistem politiknya (Zapp, 2022). Meskipun mungkin masih terlalu dini untuk menyadari kerusakan jangka panjang yang dilakukan oleh para pemimpin populis terhadap reputasi sains di masyarakat, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan dampak retorika anti-ilmiah di "era pasca-kebenaran" (*post truth era*).

Dalam penelitian Noori tentang legitimasi, ia menemukan suatu asumsi yang mendekati konsep the citizen post truth era. Ia menemukan bahwa terdapat legitimasi ilahi dan demokratis di negara Republik Islam Iran (*There is divine and democratic legitimacy in the Islamic Republic state of Iran*) (Noori, 2023). Oleh karena itu, birokrasi menghadapi dikotomi seperti 'komitmen agama dan menjadi berkualitas/profesional' (*religious commitment and being qualified/professional*), 'akuntabilitas kepada Vali-e-Faqih dan publik' (*accountability to Vali-e-Faqih and public*), 'dikotomi pajak sedekah' (*alms-tax dichotomy*), dan 'lembaga dan Bonyads' (*institutions and Bonyads*). Cordova dalam risetnya tentang pembentukan kantor polisi perempuan di Cina menunjukkan bahwa hal tersebut menghasilkan efek umpan balik yang positif di kalangan perempuan, sehingga menghasilkan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap polisi di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki dan menutup kesenjangan gender dalam persepsi

efektivitas polisi. *WPS increase police legitimacy among women by improving perceptions of personal safety and government responsiveness* (Córdova & Kras, 2020). Alfieroho mengungkapkan hasil penelitian tentang kekecewaan dan kinerja buruk KPS yang kontroversial di Nigeria, seperti kebanyakan negara berkembang, umumnya dikaitkan dengan penolakan masyarakat karena kegagalan lembaga atau kompetensi apa pun, sehingga, penerimaan sosial dan legitimasi mereka masih dipertanyakan (Afieroho et al., 2023).

Dalam perumusan kebijakan publik, secara demokratis harus terdapat prinsip bottom up atau partisipatif agar objek kebijakan publik dapat mengetahui dampak yang akan dihadapi, dan ini adalah salah satu unsur pembentuk legitimasi. Taylor menyebutkan di belanda, Skala dan asimetri kekuasaan perusahaan teknologi komersial atas masyarakat melalui data, ditambah dengan meningkatnya keterlibatan sektor swasta dalam tata kelola publik, berarti semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih tidak terlibat dengan perusahaan teknologi. Hal ini menciptakan potensi relasi kekuasaan yang mendominasi, dan menuntut kita untuk memutuskan apa yang merupakan legitimasi untuk bertindak terhadap publik (Taylor, 2021). Darajat mengungkapkan hasil risetnya tentang dampak legitimasi, layanan publik, dan demokrasi terhadap kualitas pendidikan di negara-negara Asia terpilih seperti India, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Afghanistan, Tiongkok, Nepal, Bangladesh, Turki, dan Saudi. dan hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel dependen berhubungan secara signifikan terhadap mutu pendidikan (Daradjat, 2020). Di negara Fiji, Chand mengungkapkan bahwa korupsi dan kebrutalan polisi merupakan dua kekhawatiran publik yang perlu diatasi oleh Kepolisian Fiji untuk mendapatkan rasa hormat, kepercayaan, keyakinan, dan legitimasi publik (Chand et al., 2022).

Namun demikian, terkadang legitimasi tidak hanya ditemukan di negara demokrasi ataupun yang sedang mengalami kekacauan demokrasi. Contohnya dari hasil penelitian oleh Schafer di Turki, dukungan rakyat terhadap pemimpin yang kuat dan tidak demokratis berkembang secara independen dari Erdoğan dan AKP, namun kemudian terkonsolidasi di belakang partai tersebut. kemakmuran ekonomi – yang jauh dari memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi–memperkuat dukungan terhadap pemimpin yang kuat sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal di kalangan masyarakat yang paling diuntungkan secara ekonomi (Schafer, 2021). Ini didukung oleh hasil riset Lucciarini dan Galdini bahwa Teori institusionalis memberikan peran sentral pada legitimasi dalam konstruksi proses sosial, dengan mendefinisikannya sebagai bentuk umum penerimaan sosial terhadap seorang aktor, ide, atau proyek (Lucciarini & Galdini, 2023). Dalam penelitian Eabrasu menunjukkan hasil tentang skala legitimasi organisasi dapat naik dan turun, bergantung pada kualitas kontak dengan pemangku kepentingan sosial (Eabrasu et al., 2021).

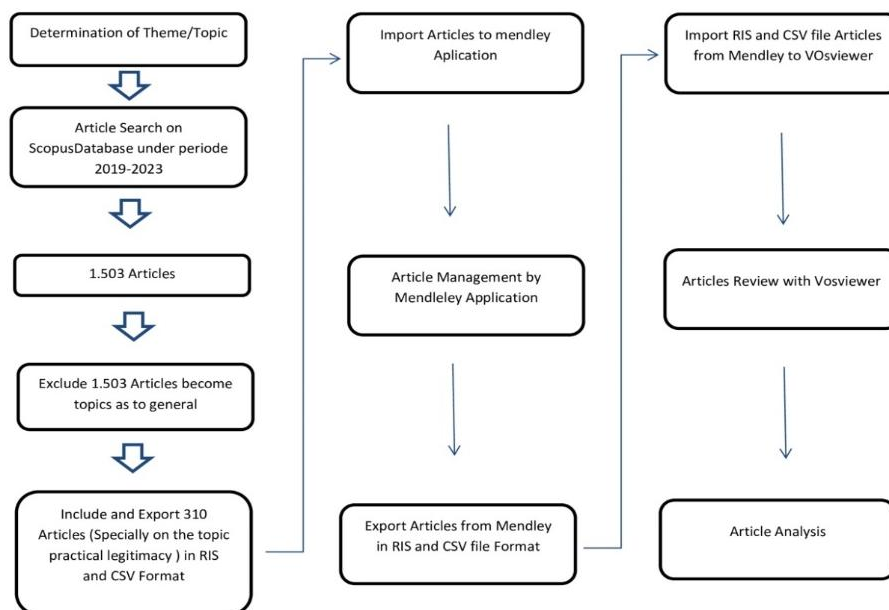
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ditemukan bahwa legitimasi adalah pengakuan terhadap suatu kekuasaan dan kewenangan yang digerakkan oleh suatu entitas organisasi yang berdampak pada masyarakat atau publik. Pada dasarnya, legitimasi bisa terbentuk karena tindakan dan/atau perilaku entitas organisasi sesuai dengan sistem nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat mayoritas tempat ia

menggerakkan kekuasaan dan kewenangannya. Selain itu, legitimasi dapat mengalami dinamika kenaikan dan penurunan karna ia bergantung pada kesesuaian keputusan yang dijalankan dengan asumsi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya dipengaruhi seberapa besar demokratisasinya, tetapi juga ketepatan pengambilan keputusan (*decision making*) yang bersifat teknokratis.

Legitimasi adalah elemen utama dalam mencapai stabilitas sosial politik. Selain dengan mengedepankan kuantitas massa yang dipengaruhi oleh asumsi tentang figure dan citizen post truth era, legitimasi juga perlu dibangun dengan membagikan sinyal positif, menguasai substansi kewenangan dan kekuasaan mandat, serta komunikasi politik yang baik terhadap publik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perkembangan kajian tentang topik legitimasi praktis dalam kurun waktu 2019-2023 di berbagai negara di dunia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan novelty atau kebaruan berupa kebenaran ilmiah bahwa legitimasi praktis adalah sesuatu yang berdampak negatif bagi kepentingan bersama dalam jangka panjang sehingga hal tersebut penting untuk menjadi bahan riset. Hal ini akan ditinjau melalui studi literatur tentang teori dan konsep legitimasi, ilmu politik, dan sosial budaya. Yang akan ditonjolkan dalam penelitian ini adalah berupa pentingnya pengetahuan (*science*) bagi masyarakat tentang ilmu politik, memahami rasio kegunaan kewenangan dan kekuasaan yang tepat, serta prinsip perumusan kebijakan, sehingga masyarakat dapat mendistribusikan legitimasinya kepada elit yang lebih tepat dan mengurangi adanya tindakan politik praktis.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* yang menggunakan 310 artikel ilmiah bersumber dari database scopus. Tujuan penggunaan *metode systematic literature review* (SLR) dalam penelitian ini adalah untuk menggali data tentang seberapa banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tentang legitimasi praktis. Selain itu, data yang telah diperoleh dalam metode ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat dominasi topik yang telah banyak maupun yang belum banyak dibahas oleh para peneliti. Dan berdasarkan perolehan data tersebut, kebaruan topik dan isu-isu apapun yang belum banyak diteliti dapat ditetapkan sebagai bahan riset di masa yang akan datang. Metode ini penting dipelajari dan digunakan untuk menemukan kebaruan dalam suatu bidang penelitian. Gambaran mengenai sistematika metode penelitian dengan menggunakan SLR dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian *Systematic Literatur Review* (Diolah tahun 2024)

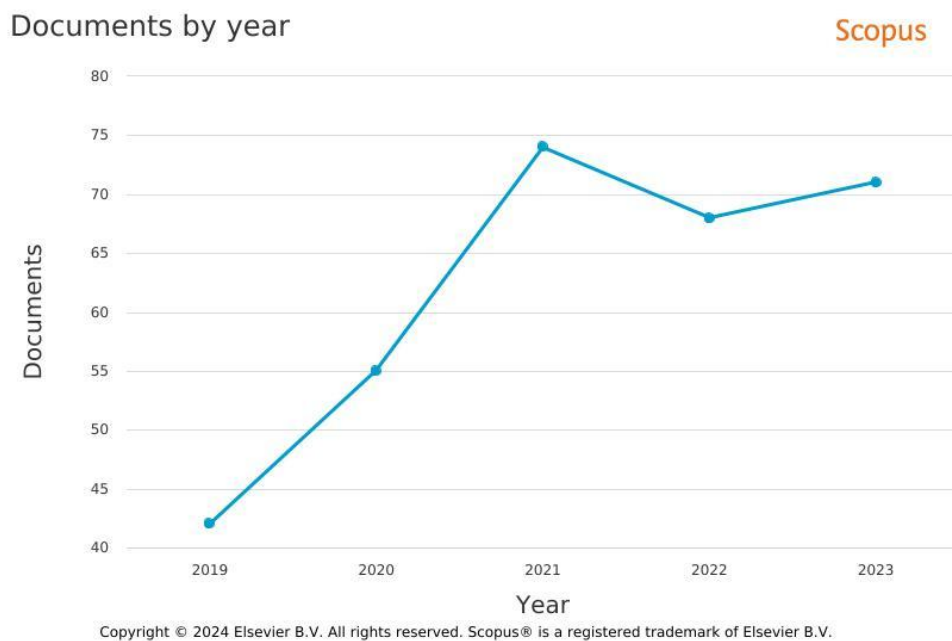
Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian yaitu “apa yang dimaksud dengan legitimasi praktis”, “bagaimana karakteristik legitimasi praktis jika ditinjau dari perspektif ilmu politik”, dan “apa kontradiksi legitimasi praktis dengan ilmu politik”, dengan tujuan melakukan transformasi suatu permasalahan yang ditemukan sebagai fakta untuk menjadi question problem. Selanjutnya adalah mengembangkan perencanaan dan struktur penelitian sistematik literatur review. Source yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah database scopus tentang legitimasi praktis di berbagai negara di dunia. Kemudian hasil temuan-temuan artikel yang sudah diperiksa kualitas temuannya dengan metode statistik akan dirangkum dan disajikan hasil visualisasinya. Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dimulai dengan pencarian artikel menggunakan kata kunci “legitimasi praktis” dalam database Scopus untuk periode 2019-2023.

Pencarian ini mengidentifikasi 310 artikel yang kemudian ditinjau berdasarkan tahapan: pencarian artikel, impor artikel dalam perangkat lunak aplikasi, dan pemetaan topik diskusi. Beberapa artikel yang memiliki kaitan kuat diperoleh peneliti berdasarkan prosedur berikut: pertama, identifikasi artikel berusaha menyortir dan memilih berbagai artikel sehingga hanya yang terkait dengan topik yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan memasukkan kata kunci “legitimasi praktis” di kolom pencarian, dengan pembatasan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Berdasarkan proses pencarian, diperoleh 1.503 artikel terkait topik tersebut. Tahap kedua melibatkan verifikasi berbagai pasal yang ditemukan untuk menentukan apakah mereka benar-benar dibutuhkan dan terkait erat dengan masalah legitimasi praktis. Verifikasi dilakukan dengan membatasi bidang subjek (ilmu sosial), jenis dokumen (jurnal), tahap publikasi (final), dan bahasa (bahasa Inggris). Proses verifikasi mengidentifikasi 310 artikel/jurnal yang relevan dengan legitimasi praktis. Artikel-artikel ini digunakan sebagai referensi untuk mempelajari “legitimasi praktis”.

Tahapan proses *Systematic Literature Review* diatas membutuhkan bantuan aplikasi untuk mempermudah prosesnya. Aplikasi yang digunakan adalah VOSviewer. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang sering digunakan untuk melakukan analisis bibliografi. VOSviewer didesain bisa menggambarkan metrik sitasi dari metadata yang diambil dari lembaga pengindeks database scopus. Aplikasi VOSviewer bisa mencari penulis, nama publikasi, judul, kata kunci, dan bisa memetakan rentang tahun artikel dan jumlah sitasi. Dan VOSviewer juga digunakan untuk memvisualisasikan bibliografi, atau data set yang berisi field bibliographi (judul, pengarang, penulis, nama jurnal, dan sebagainya). Dalam dunia kajian, VOSviewer digunakan untuk analisis bibliometrik, mencari topik yang masih memiliki peluang untuk diteliti (*research gap*), mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu dan sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

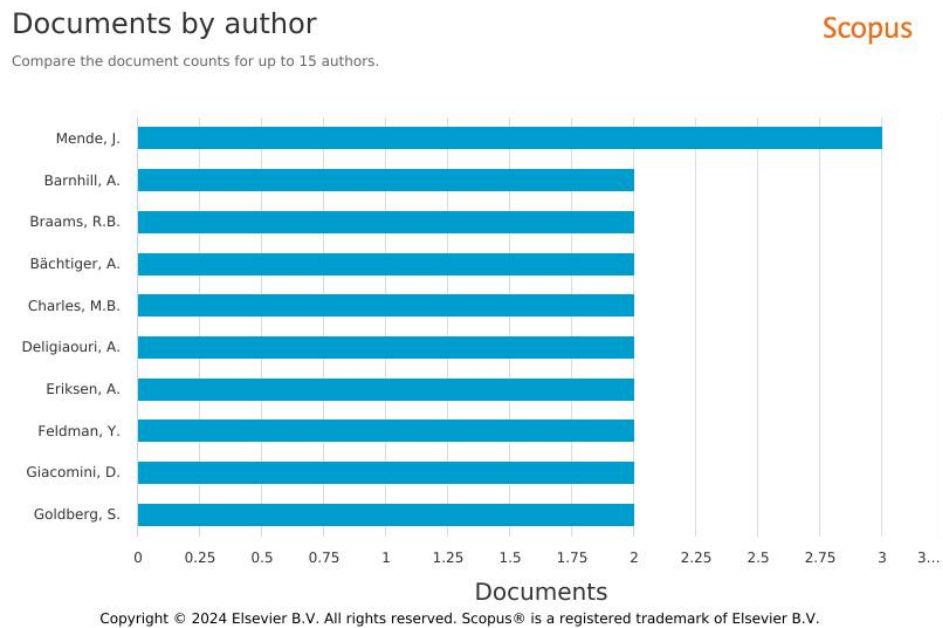
Hasil Penelitian



Gambar 2. Publikasi berdasarkan tahun (Scopus)

Artikel tentang topik legitimasi praktis adalah artikel yang memiliki tren dinamis sepanjang periode tahun 2019-2023. Jumlah yang paling sedikit didapati pada tahun 2019 sebanyak 40 artikel. Sedangkan artikel tentang topik legitimasi praktis paling banyak dibahas pada tahun 2021 yaitu sebanyak 75 artikel. Peningkatan publikasi artikel tentang topik legitimasi praktis mengalami peningkatan yang signifikan pada periode tahun 2019 hingga tahun 2021, yaitu sebanyak 40 hingga 74 artikel yang dipublish. Setelah itu, publikasi kajian mengenai legitimasi praktis mengalami penurunan sampai pada tahun 2022 menjadi kurang dari 70 publikasi artikel. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh pembahasan, kajian ilmiah, serta opini public didominasi oleh topic mengenai pandemi Covid-19 pada periode ini. Kemudian, kajian mengenai topic

legitimasi praktis kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang mencapai lebih dari 70 artikel.



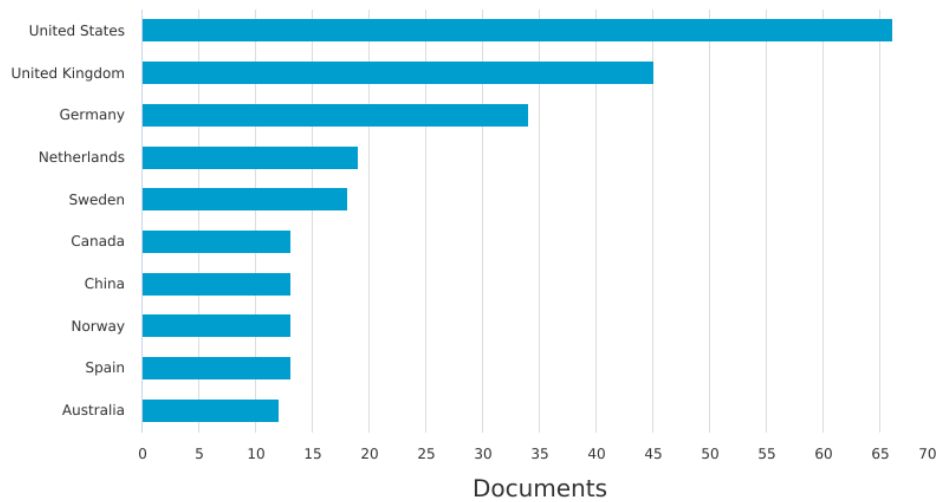
Gambar 3. Jumlah publikasi berdasarkan penulis (Scopus)

Selanjutnya, 10 orang penulis yang menunjukkan angka publikasi tertinggi dapat dilihat pada gambar 3. Sepanjang periode tahun 2019-2023, Mende, J. tercatat sebagai penulis dengan publikasi terbanyak yaitu 3 artikel. Melalui Cambridge University Press, Mende, J. mempublikasikan salah satu hasil risetnya tentang kontestasi lembaga-lembaga tata kelola global dapat memperkuat atau melemahkan, serta mentransformasi lembaga-lembaga tersebut. Hasilnya, Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan Proses Perjanjian tidak hanya bergantung pada reaksi langsung terhadap kontestasi, namun juga pada kemampuannya untuk (kembali) membangun berbagai otoritas terkait (Mende, 2021). Dalam artikel yang lain, Mende, J. juga menyatakan hasil riset tentang Studi internasional yang menyelidiki otoritas tata kelola negara versus aktor non-negara dalam hal otoritas publik atau swasta (Mende, 2023), serta kajian tentang gagasan mengenai kepentingan publik atau kepentingan umum merupakan hal yang menjadi acuan utama dalam mencapai legitimasi tata kelola global dan para gubernur global (Mende, 2023). Sisanya, Sembilan orang penulis yaitu Barnhill, A., Braams, R.B., Bächtiger, A., Charles, M.B., Deligiaouri, A., Eriksen, A., Feldman, Y., Giacomini, D., and Goldberg, S. Masing-masing menerbitkan dua artikel.

Documents by country or territory

Scopus

Compare the document counts for up to 15 countries/territories.



Copyright © 2024 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

Gambar 4. Publikasi berdasarkan negara (Scopus)

Data tentang 10 negara di dunia dengan jumlah publikasi terbanyak dapat dilihat pada gambar 4. Berdasarkan gambar diatas, United States menjadi negara dengan publikasi terbanyak tentang topik kajian legitimasi praktis sepanjang periode tahun 2019-2023 dengan jumlah lebih dari 65 artikel. Selanjutnya, disusul oleh United Kingdom sebanyak 45 artikel, german 35 artikel, netherland 18 artikel, sweden 17 artikel, Canada, China, Norway, dan Spain yang masing-masing mempublish 13 artikel, dan yang terakhir Australia dengan 12 artikel. Negara United States disinyalir memiliki publikasi tertinggi tentang topic legitimasi praktis dikarenakan legitimasi erat kaitannya dengan kondisi negara demokrasi.



Uraian berikut merupakan prosedur tindak lanjut yang bersumber dari berbagai artikel/jurnal setelah proses seleksi dan verifikasi sebelumnya. Hasil *review* diolah menggunakan aplikasi VOSviewer untuk mengkategorikan konsep berdasarkan kluster atau kelompok. Gambar 5 menunjukkan berbagai nama konsep yang ditampilkan dengan kepadatan cluster, dengan total link 161 dan total kekuatan link 99. Perbedaan antara warna cluster merupakan indikasi diferensiasi atau perbedaan antara satu kelompok diskusi dan kelompok fokus lainnya. Ini memudahkan peneliti untuk memetakan kelompok data sehingga mereka dapat dipelajari dan dianalisis. Mengenai kajian legitimasi praktis, Gambar 5 menampilkan warna yang berbeda untuk setiap klaster yang ada dan mengacu pada pengelompokan konsepnya masing-masing.

Tabel 1. Tema dikelompokkan berdasarkan kluster

Kluster	Konsep	Jumlah Topik
Kluster 1	Support, Perception, Experience, Risk, Population, Effect, View, Quality, Experiment, Individual, Respondent, Survey, Attitude, Police, Police legitimacy, Trust, Information, China, Region, Gap, Decade, Resident, Addition, Community, Factor, Conflict, Ability, Agency.	29
Kluster 2	Power, Interest, Rule, Goal, Legitimation, Justification, Authority, Reason, Member, Hand, Debate, Regulation, Point, Crisis, Democracy, Covid, Pandemic, Decision making, Argument, Input, Output legitimacy, Idea, Democratic legitimacy, Expertise, Essay, Respect, Criticism.	30
Kluster 3	Practice, Framework, Insight, Field, Influence, Implementation, Stakeholder, Accountability, Order, Public sector, Transparency, Need, Author, Health, Education, Interview, Building, Case study, Design methodology approach, Company, Consideration, Measure, Extent, Problem, Public administration.	30
Kluster 4	Concept, Politic, Account, Place, Periode, World, Court, Scholar, Period, Germany.	10

Sumber: Data diolah tahun 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa kluster 1 dominan membahas bagaimana *perception* mempengaruhi populasi, kepercayaan, pengalaman, hingga legitimasi kebijakan. Pada kluster 1, kata kunci yang paling dominan adalah *perception*. Hal ini menunjukkan bahwa topik *perception* memiliki frekuensi tertinggi, atau sering disebutkan, pada kluster 1. Hal ini terjadi karena semua konsep yang ditulis oleh penulis selalu mengacu pada *perception*. Maggetti & Papadopoulos (2023) mengemukakan hasil temuan tentang *perception* secara empiris yang dieksplorasi melalui perasaan akuntabilitas lembaga terhadap departemen induk di Swiss, yang menyajikan kasus membingungkan mengenai akuntabilitas yang relatif rendah menurut survei terhadap manajer lembaga di tujuh negara demokrasi yang sudah mapan (Australia, Denmark, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss, dan Inggris). Temuannya menunjukkan perbedaan antara lembaga regulator dan non-regulator, serta menunjukkan bahwa persepsi lembaga regulator mengenai lemahnya akuntabilitas sebagian besar berasal dari sikap pasif kementerian induk sebagai forum akuntabilitas resmi.

Dalam kluster 1 pula, hasil temuan yang cukup menarik juga ditunjukkan oleh temuan Yang Z. (2023) tentang komunikator sains ilmuwan Tiongkok. Wawancara kualitatif dengan komunikator sains ilmuwan Tiongkok dan komunikator sains warga di Zhihu menunjukkan bahwa ada perjuangan antara kedua kelompok untuk dianggap sebagai komunikator sains yang sah secara online. Pengguna publik berusaha menunjukkan

antusiasmenya sebagai komunikator sains, berintegrasi ke dalam lingkaran komunikator sains, dan mengaburkan batasan antara ilmuwan dan dirinya sendiri. Namun, Para ilmuwan yang berpartisipasi cenderung mengabaikan kegiatan tersebut dan menunjukkan bahwa mereka adalah komunikator sains yang lebih sah, memiliki literasi sains yang diperlukan dan moralitas pribadi yang mulia.

Klaster 2 didominasi oleh *democracy* sebagai arena dalam memperoleh legitimasi. Pada klaster 2, *democracy* mendominasi hubungan antar topik seperti *debate*, *argument*, *interest*, *power*, *input*, dan *output legitimacy*. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan penulis menuangkan hasil riset tentang legitimasi yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip *democracy*. Dalam *democracy*, seperti hasil temuan sebelumnya yang telah dikemukakan oleh penulis, prinsip kebebasan bagi warga negara untuk terlibat dalam menilai kebijakan publik adalah hal berupa input, yang kemudian melalui *debate*, *argument* serta *interest* menghasilkan *output legitimacy*. Termasuk legitimasi praktis, berdasarkan temuan Yang Z tentang ilmuwan sebagai komunikator sains yang merasa lebih sah dan memiliki moralitas pribadi yang lebih mulia, mengindikasikan adanya hasrat pembentukan legitimasi secara praktis dengan tidak memperdulikan antusiasme publik dalam komunikasi politik sebagai representasi prinsip demokrasi. Sehingga, hal ini juga merupakan salah satu bentuk kontadiksi legitimasi praktis dengan ilmu politik. Studi kasus yang dilakukan secara longitudinal menggambarkan sifat legitimasi di sektor publik yang berfluktuasi dan dibangun secara sosial. Temuan ini menunjukkan minat awal terhadap perbaikan operasional berubah menjadi perilaku mencari legitimasi oleh organisasi kasus ketika langkah-langkah yang dibuat dimodifikasi agar sesuai dengan perubahan preferensi para pemangku kepentingan utama. Sehingga, terdapat ketidaksesuaian yang terus-menerus antara kegiatan organisasi dan harapan dewan, yang pada akhirnya menyebabkan penutupan organisasi (Mättö et al., 2020).

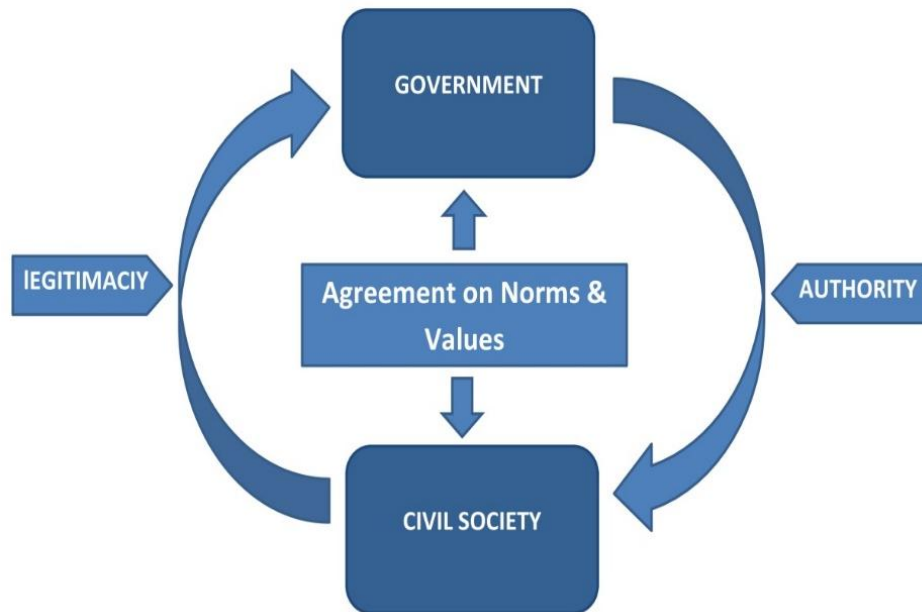
Klaster 3 didominasi oleh kajian topik tentang *framework*. Keterkaitan topik *framework* dan legitimasi megacu pada unsur-unsur seperti *stakeholder*, *accountability* dan transparansi. Kerangka kerja pemerintahan dianggap sebagai pemberi sinyal terhadap publik untuk memunculkan preferensi dan penilaian terhadap kinerjanya sehingga dari sana dapat muncul legitimasi. Seperti halnya temuan riset mengenai Auditor Jenderal Selandia Baru yang mendapatkan masukan dari berbagai sumber seperti tim audit mereka sendiri, pertimbangan parlemen, Kementerian Kesehatan, Dewan Kesehatan Distrik, media dan kekhawatiran serta keluhan masyarakat mengenai kesehatan, dan Sumber-sumber ini menginisiasi ide-ide untuk audit kinerja. Hal ini memberikan sinyal kepada aktor-aktor utama, seperti Kementerian Kesehatan dan DHB, bahwa NZOAG sedang menangani topik dan permasalahan yang relevan dengan Kementerian Kesehatan sambil menjalankan peran akuntabilitas publiknya, tentunya ini berdampak baik dan positif bagi peningkatan legitimasi terhadap otoritas setempat melalui *framework* dan kinerja para *stakeholder* terkait (Nath et al., 2020).

dianalisis menggunakan alat bernama VOSviewer untuk mengolah data dan memunculkan tema atau konsep dominan terkait kajian legitimasi praktis. Konsep/tema dominan yang sering dibahas oleh peneliti sebelumnya antara lain demokrasi, *decision making*, *debate*, *argument*, *view*, *effect*, *support*, *experience*, *trust*, *perception*, *community*, *gap*, *survey*, *attitude*, *police*, *power*, *practice*, *accountability*, *framework*, *interest*, dan *legitimation*. Ketebalan warna pada Gambar 6 menunjukkan seberapa dominan setiap kelompok fokus. Kelompok tema dengan warna paling tebal adalah tema yang paling banyak dibahas. Berbagai kelompok konsep dominan ini memiliki simbiosis mutualisme yang kuat sehingga memudahkan peneliti untuk sampai pada kesimpulan yang mengerucut untuk studi terkait legitimasi praktis. Tinjauan tema dominan ini diperlukan untuk memberikan referensi konsep yang sering dibahas.

Salah satu bentuk relasi mutualisme dalam topik dominan pada gambar 6 ditunjukkan oleh unsur *community* dan *interest*, yang dimana minat masyarakat terhadap keterlibatan politik juga merupakan komponen pembentuk legitimasi. Hal ini dibuktikan melalui riset yang menyatakan bahwa meskipun tingkat kejahatan telah menurun selama beberapa dekade, ketegangan yang berkepanjangan antara polisi dan masyarakat terus menggagalkan pembentukan hubungan kerja sama yang diperlukan untuk fungsi polisi dan penyediaan keselamatan publik. Temuan menunjukkan bahwa satu kali kontak positif dengan petugas polisi berseragam dapat meningkatkan sikap masyarakat terhadap polisi secara signifikan, termasuk legitimasi dan kemauan untuk bekerja sama (Peyton et al., 2019). Kyprianides et al., (2021) juga menyatakan, rasa kebersamaan dalam keanggotaan kelompok dengan pemegang kekuasaan sebagai perwakilan simbolis yang kuat dari “masyarakat yang taat hukum,” akan melahirkan kepercayaan, legitimasi, dan kerja sama. Ada tema dominan lain yang tidak dapat sepenuhnya dibahas oleh penelitian ini. Namun demikian, masing-masing tema dominan yang terdapat pada Gambar 6 memiliki korelasi satu sama lain dan dapat dijadikan acuan kajian terkait legitimasi praktis. Ketika melakukan kajian terkait legitimasi praktis, perlu dipahami terlebih dahulu konsep-konsep dominan yang telah dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini penting karena dapat memudahkan peneliti untuk Meringkas dan menghasilkan kesimpulan yang relevan mengenai tema legitimasi praktis.

Diskusi Hasil Penelitian

Hasil analisis sebelumnya telah banyak menggambarkan tren positif serta negatif dalam perkembangan studi atau riset tentang legitimasi. *Literature review* yang telah dituangkan sebelumnya juga telah banyak menggambarkan dan menjelaskan dinamika yang sedemikian rupa. Signifikansi positif dalam tubuh legitimasi dibuktikan dengan asumsi masyarakat yang mendukung kebijakan publik dan otoritas tertentu diberbagai wilayah di dunia. Tentunya hal tersebut dibangun dengan proses otoritas yang interaktif dengan masyarakat secara simultan. Unsur-unsur seperti *perception*, *interest*, dan *decision making* adalah komponen yang mewakili ciri karakteristik legitimasi yang berangkat dari keinginan mengedepankan kepentingan public, dan sudah selayaknya mendapatkan respon pengakuan positif dari publik. hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Proses terbentuknya legitimasi (Penulis, 2024).

Berdasarkan *design mind map* pada gambar 7, pada dasarnya legitimasi terbentuk karena adanya kesepakatan nilai yang terjalin dalam interaksi sosial dan politik antara pemerintah selaku pemegang wewenang dan masyarakat selaku pemberi wewenang. Interaksi tersebut terepresentasi dalam bentuk perumusan kebijakan public, pelaksanaan kebijakan public, sampai dengan respon sebagai evaluasi kebijakan publik (Gallardo-Vázquez et al., 2019). Kesesuaian nilai yang terkandung dalam interaksi dapat berupa moralitas, ideology, kepentingan, orientasi serta nilai-nilai lain yang disepakati sebagai alat untuk terlegalkannya suatu kekuasaan dan wewenang pemerintah terhadap masyarakat secara demokratis (Haggart & Keller, 2021). Ini adalah dasarnya. Namun, legitimasi sangatlah *flexible* dan tergantung dari bagaimana unsur-unsur pembangun legitimasi itu diterapkan. Apabila maksud dan tujuan dari upaya pembentukan legitimasi dilakukan dengan maksud dan tujuan mewujudkan keinginan si pemberi legitimasi pula, maka dapat dipastikan pengakuan public terhadap pelaksana wewenang dapat terjamin eksistensinya. Hal ini sudah banyak dibuktikan dalam penelitian. Namun, yang harus menjadi kebaruan bagi riset selanjutnya adalah, bagaimana dekadensi legitimasi seperti yang telah ditemukan dalam analisis artikel diatas dapat dibuktikan sebagai praktik legitimasi yang salah dan tidak memiliki orientasi yang objektif. Memberikan hak istimewa kepada wacana publik konservatif yang dipimpin oleh negara, terutama dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, semakin menguatkan kontribusi masyarakat sipil (Fröhlich & Skokova, 2020).

Telah diuraikan dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa legitimasi dapat terbentuk dalam pemerintahan atau aktivitas politik yang bersifat demokratis. Keseuaian nilai yang menghubungkan anatara otoritas dengan masyarakat sipil mencakup nilai-nilai rosponsibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan teknokratis sebagai kemampuan pemerintah dalam menyikapi pola mekanisme demokrasi substansial yang sangat representative bagi masyarakat sipil. Namun karena luasnya pelaksanaan demokrasi pula, legitimasi dapat merosot akibat kurangnya ketepatan dalam

mengaplikasikan unsur-unsur tersebut. Ini seharusnya menjadi alasan yang kuat untuk mengusut bahwa pada mulanya pembentukan legitimasi atas pengakuan kekuasaan secara prosdural dan bukan substansi yang berdampak hanya pada pembentukan struktur jabatan secara politik dan bukan perhitungan terhadap kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara tepat. Ditambah lagi dengan kondisi di era modern yang serba digital, upaya pembentukan legitimasi begitu mudah dengan menggiring opini publik terhadap gagasan positif tentang organisasi, namun juga begitu mudah untuk mengalami penurunan, karena berdasarkan temuan Holmgreen (2021), dengan adanya media sosial, organisasi harus menghadapi kenyataan baru dalam menghadapi kecaman publik. Oleh karena itu, media sosial memberikan akses instan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap perilaku organisasi, yang berpotensi menimbulkan efek negatif jangka panjang terhadap citra dan organisasi tersebut. Dengan demikian, berdasarkan prinsip negara demokrasi sebagai ruang yang luas bagi dinamika legitimasi, tentu terdapat celah bagi terbentuknya legitimasi praktis yang belum banyak diteliti sebagai kajian ilmu politik.

Namun ternyata, hasil penelitian yang telah uraikan sebelumnya pun juga menyatakan bahwa legitimasi tidak hanya dapat terbentuk dinegara demokratis, walaupun dalam jumlah yang lebih kecil. Contohnya seperti yang terjadi di negara turki, dukungan terhadap pemimpin yang kuat tetapi tidak demokratis mengarah begitu kuat dikarenakan kemampuannya mengakomodir pemerintahan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat setempat sebagai pemerintahan yang lebih baik dari pemerintahan berbentuk demokrasi, dan bahkan dapat menjadi alternatif demokrasi liberal. Hal ini merupakan bahwa legitimasi adalah perkara yang berkaitan dengan kualitas interaksi sebagai turunan kesepakatan nilai antara pimpinan dengan para pemangku kepentingan sosial seperti yang terilustrasikan dalam gambar 7. Sejalan dengan hasil penelitian oleh Farazmand et al., (2023) bahwa kebijakan yang sah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja krisis karena kebijakan tersebut dapat menjamin kepatuhan pemangku kepentingan publik dan warga negara.

Kesimpulan

Studi terkait legitimasi praktis penting dan perlu dipresentasikan secara luas. Pesatnya proses demokratisasi diberbagai negara, menjadi unsur yang paling mempengaruhi konstruksi legitimasi. Legitimasi merupakan unsur penting dalam kerangka mobilitas kekuasaan atau pemerintahan. Pasalnya, legitimasi adalah sebuah relasi atau hubungan politis antara yang memerintah dengan yang diperintah dan/atau yang memimpin dengan yang dipimpin. Fokus kajian penelitian ini mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana Perkembangan kajian topik tentang legitimasi praktis dalam periode tahun 2019-2023 dan bagaimana seharusnya legitimasi dibentuk idealnya berdasarkan pemahaman tentang ilmu politik, sehingga dapat menjadi *question problem* demi kebaruan riset tentang legitimasi praktis yang berdampak buruk bagi stabilitas politik”. Konsep/tema dominan yang sering dibahas oleh peneliti sebelumnya antara lain demokrasi, *decision making*, *debate*, *argument*, *view*, *effect*, *support*, *experience*, *trust*, *perception*, *community*, *gap*, *survey*, *attitude*, *police*, *power*, *practice*, *accountability*, *framework*, *interest*, dan *legitimation*. Hasil analisis

sebelumnya telah banyak menggambarkan tren positif serta negatif dalam perkembangan studi atau riset tentang legitimasi. Pada dasarnya legitimasi terbentuk karena adanya kesepakatan nilai yang terjalin dalam interaksi sosial dan politik antara pemerintah selaku pemegang wewenang dan masyarakat selaku pemberi wewenang. Selain itu, faktor menurunnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintah dalam hubungan politik adalah karena ketidaktepatan dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada kepentingan publik. berdasarkan argument tersebut, legitimasi tidak hanya dipengaruhi oleh proses demokrasi atau model pemerintahan otoriter sekalipun, namun bagaimana pemegang kekuasaan mampu mewujudkan aspirasi atau masyarakat sipil sepenuhnya. Ini yang seharusnya menjadi argumen dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengidentifikasi adanya perilaku penggiring legitimasi praktis.

Penelitian ini berguna untuk menunjukkan perkembangan dan kebutuhan mendesak untuk legitimasi praktis di tingkat global. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu khususnya ilmu politik dan pemerintahan yang terkait dengan legitimasi, demokrasi, dan fenomena dalam ruang lingkup sosial politik. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, telah banyak yang membuktikan bahwa legitimasi dapat mengalami peningkatan dan penurunan tergantung pada proses interaksi antar elemen sosial yang ada. Akan tetapi belum banyak riset yang membuktikan indikasi adanya penyebab legitimasi yang berorientasi tidak benar sesuai kepentingan publik. Oleh karena itu, riset ini juga berkontribusi untuk memberikan research gap atau question problem bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Selain itu, manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pembentukan kebijakan publik yang bersifat *procedure due process of law*.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Artikel yang diulas hanya bersumber dari database Scopus, oleh karena itu, tidak adanya data pembanding menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Kemudian, keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu penelitian yang cukup singkat. Penelitian hanya dilakukan terhadap artikel yang dipublikasikan dalam periode tahun 2019-2023, sehingga perlu dilakukan penelitian yang menggunakan artikel dengan publikasi yang memiliki periode lebih panjang agar memunculkan topik yang lebih lengkap. Selain itu, Studi lebih lanjut perlu menerapkan pendekatan analisis komparatif yang menggunakan database *Web of Science* (WoS) sebagai sumber jurnal internasional bereputasi tinggi dan memperluas periode waktu dari mana sumber penelitian yang dipublikasikan.

Referensi

- Afieroho, U. E., Li, Y., Han, Y., & Radujkovic, M. (2023). Exploring the social legitimacy of urban road PPPs in Nigeria. *Organization, Technology and Management in Construction*, 15(1), 23–33. doi.org/10.2478/otmcj-2023-0004
- Aronson, O., Elad-Strenger, J., Kessler, T., & Feldman, Y. (2023). Does personalization of officeholders undermine the legitimacy of the office? On perceptions of objectivity in legal decisionmaking. *Regulation and Governance*, 17(3), 833–850. doi.org/10.1111/rego.12495
- Chand, A., Karan, M. F., & Goundar, P. (2022). Public Perceptions of Police in Fiji. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 38(3), 295–310. doi.org/10.1177/10439862221096942.
- Christenson, D. P., & Glick, D. M. (2019). Reassessing the Supreme Court: How Decisions and Negativity Bias Affect Legitimacy. *Political Research Quarterly*, 72(3), 637–652. doi.org/10.1177/1065912918794906
- Córdova, A., & Kras, H. (2020). Addressing Violence Against Women: The Effect of Women's Police Stations on Police Legitimacy. *Comparative Political Studies*, 53(5), 775–808. doi.org/10.1177/0010414019879959
- Daradjat, A. (2020). Better quality of education in Asia: Taking panel data of state legitimacy, democracy and public services. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(6), 1685–1697. doi.org/10.18844/CJES.V15I6.5326
- Eabrasu, M., Brueckner, M., & Spencer, R. (2021). A social licence to operate legitimacy test: Enhancing sustainability through contact quality. *Journal of Cleaner Production*, 293. doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126080
- Farazmand, A., Danaeefard, H., & Kazemi, S. H. (2023). The Nexus of Policy Legitimacy and Crisismanship Performance: Examining the Harmonizing Role of Value-Based Decision Making. *Public Organization Review*. doi.org/10.1007/s11115-023-00720-6
- Fröhlich, C., & Skokova, Y. (2020). Two for One: Public Welfare and Regime Legitimacy Through State Funding for CSOs in Russia. *Voluntas*, 31(4), 698–709. doi.org/10.1007/s11266-020-00203-y
- Gallardo-Vázquez, D., Valdez-Juárez, L. E., & Lizcano-álvarez, J. L. (2019). Corporate social responsibility and intellectual capital: Sources of competitiveness and legitimacy in organizations' management practices. *Sustainability (Switzerland)*, 11(20). doi.org/10.3390/su11205843
- Godinho, M. A., Borda, A., Kariotis, T., Molnar, A., Kostkova, P., & Liaw, S.-T. (2021). Knowledge co-creation in participatory policy and practice: Building community through data-driven direct democracy. *Big Data and Society*, 8(1). doi.org/10.1177/20539517211019430
- Haggart, B., & Keller, C. I. (2021). Democratic legitimacy in global platform governance. *Telecommunications Policy*, 45(6). doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102152
- Holmgreen, L.-L. (2021). Is being right legitimate? Addressing public outcries on social media. *Discourse, Context and Media*, 39 (4). doi.org/10.1016/j.dcm.2020.100458
- Konecny, S. (2020). Legitimacy of public interests in public policy. *Public Policy and Administration*, 19(2), 161–171. doi.org/10.13165/VPA-20-19-2-01

- König, P. D., & Wenzelburger, G. (2021). The legitimacy gap of algorithmic decision-making in the public sector: Why it arises and how to address it. *Technology in Society*, 67. doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101688
- Kyprianides, A., Bradford, B., Jackson, J., Yesberg, J., Stott, C., & Radburn, M. (2021). Identity, Legitimacy and Cooperation With Police: Comparing General-Population and Street-Population Samples From London. *Psychology, Public Policy, and Law*, 27(4), 492–508. doi.org/10.1037/law0000312
- Lucciarini, S., & Galdini, R. (2023). Bridging the “consent gap”: Mechanisms of legitimization in a cross-border megaproject. *Policy and Society*, 42(2), 212–225. doi.org/10.1093/polsoc/puad007
- Maggetti, M., & Papadopoulos, Y. (2023). Happily unaccountable? Perceptions of accountability by public managers. *Public Policy and Administration*, 38(4), 381–404. doi.org/10.1177/09520767221074487
- Martí, J. (2022). Crowdsourcing Crisis Management and Democratic Legitimacy. *Digital Government: Research and Practice*, 3(2). doi.org/10.1145/3532670
- Mättö, T., Anttonen, J., Järvenpää, M., & Rautiainen, A. (2020). Legitimacy and relevance of a performance measurement system in a Finnish public-sector case. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 17(2), 177–199. doi.org/10.1108/QRAM-04-2018-0027
- Mende, J. (2021). The contestation and construction of global governance authorities: A study from the global business and human rights regime. *Global Constitutionalism*, 10(3), 377–399. doi.org/10.1017/S2045381721000113
- Mende, J. (2023a). Business authority in global governance: Companies beyond public and private roles. *Journal of International Political Theory*, 19(2), 200–220. doi.org/10.1177/17550882221116924
- Mende, J. (2023b). Public Interests and the Legitimation of Global Governance Actors. *Politics and Governance*, 11(3), 109–119. doi.org/10.17645/pag.v11i3.6778
- Mladenović, I. (2022). Considerations on democracy in Rawls’s A Theory of Justice. *Prolegomena*, 21(1), 9–24. doi.org/10.26362/20220102
- Nath, N., Othman, R., & Laswad, F. (2020). External performance audit in New Zealand public health: a legitimacy perspective. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 17(2), 145–175. doi.org/10.1108/QRAM-11-2017-0110
- Noori, R. (2023). A Comparative-Historical Study of Accountability in the Persian Public Administration: Is There a Paradox?. *Public Organization Review*, 23(1), 285–303. doi.org/10.1007/s11115-022-00619-8
- Peyton, K., Sierra-Arévalo, M., & Rand, D. G. (2019). A field experiment on community policing and police legitimacy. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(40), 19894–19898. doi.org/10.1073/pnas.1910157116
- Plettenburg, S. G. J., Hoppe, T., van der Heijden, H. M. H., & Elsinga, M. G. (2021). Performance agreements to ensure societal legitimacy in the social housing sector; an embedded case study of implementation in the Netherlands. *Journal of Housing and the Built Environment*, 36(4), 1389–1415. doi.org/10.1007/s10901-020-09818-5

- Poelzer, G. (2019). A view from the top: State perspectives on legitimacy and the mine development process. *Environmental Science and Policy*, 94, 32–38. doi.org/10.1016/j.envsci.2019.01.002
- Schafer, D. (2021). A Popular Mandate for Strongmen: What Public Opinion Data Reveals About Support for Executive Aggrandizement in Turkey, 1996-2018. *South European Society and Politics*, 26(3), 355–382. doi.org/10.1080/13608746.2022.2034689
- Taylor, L. (2021). Public Actors Without Public Values: Legitimacy, Domination and the Regulation of the Technology Sector. *Philosophy and Technology*, 34(4), 897–922. doi.org/10.1007/s13347-020-00441-4
- Yang, Z. (2023). Who should be a science communicator? The struggle for 'legitimate' status as science communicators between Chinese scientists and citizens on a Chinese knowledge-sharing platform. *Public Understanding of Science*, 32(3), 357–doi.org/10.1177/09636625221118180
- Zapp, M. (2022). The legitimacy of science and the populist backlash: Cross-national and longitudinal trends and determinants of attitudes toward science. *Public Understanding of Science*, 31(7), 885–902. doi.org/10.1177/09636625221093897